

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SERTIFIKAT

No. 030/Workshop/LPPM/V/2024

Diberikan Kepada

Ir. Yodfiatfinda, M.M., Ph.D.

NIDN

0406096701

Program Studi

Agribisnis

Sebagai

Narasumber

Pada Kegiatan

***Focus Group Discussion* dengan tema
"Kebijakan Dekarbonisasi di Sektor Agro
Bisnis"**



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur - Kolaborasi - Kemandirian

Jakarta, 17 Mei 2024

KEPALA LPPM UNIVERSITAS TRILOGI



lppm Imam Rifqi Fauzi, S.P., M.Si.

**LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEBAGAI NARASUMBER FOCUS GROUP DISCUSSION
KEBIJAKAN DEKARBONISASI MELALUI INSTRUMEN
PAJAK KARBON**



Oleh:

Ir. Yodfiatfinda, Ph.D

NIDN. 0406096701

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS SAINS TEKNIK DAN DISAIN
UNIVERSITAS TRILOGI
2024**

SURAT TUGAS
No. 26/LPPM/TUG/V/2024

Berdasarkan surat No. 255.Und/EK.03/SJD/2024 dari Dewan Energi Nasional perihal Permohonan Narasumber, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Trilogi memberikan tugas kepada:

Nama : Ir. Yodfiatfinda, M.M., Ph.D.
NIDN : 0406096701
Program Studi : Agribisnis

Untuk menjadi **Narasumber** pada kegiatan berikut :

Judul/Kegiatan : **Focus Group Discussion** dengan tema **Kebijakan Dekarbonisasi di Sektor Agro Bisnis**
Hari/Tanggal : Rabu, 8 Mei 2024
Tempat : IPB International Convention Center
Botani Square Mall Lt.2
Jl. Pajajaran, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat

Dengan ruang lingkup membuat laporan akhir dari kegiatan tersebut.

Demikian surat tugas ini kami sampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 7 Mei 2024



Dr. Ahmad Rifqi Fauzi, S.P., M.Si.
Kepala LPPM Universitas Trilogi

Tembusan Yth.

- Wakil Rektor
- Kabiro. SDM



DEWAN ENERGI NASIONAL SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 49 JAKARTA 12950

TELEPON: (021) 52921621

FAKSIMILE: (021) 52920190

e-mail: sekretariat@den.go.id

Nomor : 255.Und/EK.03/SJD/2024
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Undangan Rapat

7 Mei 2024

Yang terhormat,
(Daftar terlampir)
di
Jakarta

Dalam rangka mempertajam Peta Jalan Transisi Energi Menuju *Net Zero Emission* di tahun 2060, diperlukan pendalaman materi untuk rumusan kebijakan yang mendukung implementasi pajak/pungutan karbon dan strategi percepatan kebijakan dekarbonisasi.

Dewan Energi Nasional perlu berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dalam merumuskan rekomendasi langkah-langkah strategis terkait Kebijakan Dekarbonisasi melalui Instrumen Pajak Karbon.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengharapkan Bapak/Ibu sebagai narasumber/peserta untuk menghadiri acara *focus group discussion* yang akan dilaksanakan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Rabu, 8 Mei 2024
waktu : 09.30 WIB s.d. selesai
tempat : IPB International Convention Center
Botani Square Mall Lt.2
Jl. Pajajaran, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat
acara : (agenda terlampir)
pimpinan rapat : Dr. Dina Nurul Fitria, S.E., M.T., CSCA., CRP

Mengingat pentingnya acara dimaksud, kami mohon kehadiran Bapak/Ibu atau menugaskan maksimal 2 (dua) pejabat terkait. Untuk konfirmasi kehadiran serta teknis pelaksanaan dapat menghubungi Sdr. Agnes Novita Sabatina (HP/WA: 08118440211).

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal DEN,

Djoko Siswanto

Lampiran I Daftar Undangan

Nomor : 255.Und/EK.03/SJD/2024

Tanggal : 7 Mei 2024

Anggota Unsur Pemangku Kepentingan DEN

1. Dr. Ir. Eri Purnomohadi, M.M.
2. Dr. Ir. As Natio Lasman
3. Dr. Dina Nurul Fitria, S.E., M.T., CSCA., CRP
4. Ir. Abadi Poernomo Dipl. Geoth, En. Tech

Kementerian dan Lembaga

1. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
2. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Bappenas
4. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM
5. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM
6. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM
7. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM
8. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
9. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian
10. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak, Kementerian Keuangan
11. Direktur Kebijakan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam, dan Ketenaganukliran
12. Direktur Neraca Produksi, BPS

Badan Usaha dan Asosiasi

1. Direktur PLTU Batubara, PLN Indonesia Power
2. Indonesia Power
3. Vice President of Energy Transition and Climate Change, PT PLN (Persero)
4. Oki Muraza, Ph.D, Senior Vice President, Technology Innovation, Pertamina (Persero)
5. Vice President Pertamina Energy Institute
6. Ketua Asosiasi Logistik Indonesia
7. Sekretaris Jenderal, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia
8. Direktur Utama, PT. Wisma Kosgoro

Perguruan Tinggi

1. Retno Gumilang Dewi - Pusat Kebijakan Keenergian ITB
2. Yodfiatfinda, Ph.D, Universitas Trilogi

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

1. Kepala Biro Umum
2. Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan
3. Kepala Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Darurat Energi

Lampiran II Agenda Rapat

Nomor : 255.Und/EK.03/SJD/2024

Tanggal : 7 Mei 2024

AGENDA FOCUS GROUP DISCUSSION KEBIJAKAN DEKARBONISASI MELALUI INSTRUMEN PAJAK KARBON

WAKTU	URAIAN	KETERANGAN
Tema: Kebijakan dan Strategi Implementasi Pajak Karbon		
09.30 – 09.40	Pembukaan	Dr. Dina Nurul Fitria, S.E., M.T., CSCA., CRP (Fasilitator)
09.40 – 10.25	Strategi Penerapan Pajak Karbon (a.l roadmap pajak karbon, skema pasar karbon, akuntansi pajak karbon, sumber pendanaan dekarbonisasi sektor energi)	1. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan 2. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan 3. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak, Kementerian Keuangan
10.25 – 10.40	Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Sektor Energi dan Sektor Industri (a.l mekanisme dan capaian aksi mitigasi, penerbitan Sertifikasi Pengurangan Emisi GRK)	Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK
10.40 – 10.55	Nilai Ekonomi Karbon Sektor Industri	Retno Gumilang Dewi - Pusat Kebijakan Keenergian ITB
10.55 – 11.10	Kebijakan Dekarbonisasi di Sektor Agro Bisnis	Yodfiatfinda, Ph.D, Universitas Trilogi
11.10 – 11.55	Diskusi	Seluruh peserta
11.55 – 12.00	Kesimpulan	Dr. Dina Nurul Fitria, S.E., M.T., CSCA CRP (Fasilitator)
12.00 – 13.00	Ishoma	Seluruh peserta

WAKTU	URAIAN	KETERANGAN
Tema: Strategi Bisnis dan Mekanisme Penerapan Instrumen Pajak Karbon pada Proyek Energi		
13.00 – 13.10	Pembukaan	Dr. Dina Nurul Fitria, S.E., M.T., CSCA CRP (Fasilitator)
13.10 – 13.40	Dampak Emisi dan Pajak Karbon bagi Kegiatan Lapangan Usaha	Direktur Neraca Produksi, BPS
13.40 – 14.10	Strategi Bisnis dalam Implementasi Penerapan Pajak karbon (a.l potensi proyek retrofit PLTU, proyek EBT, <i>Renewable Energy Certificate</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur PLTU Batubara, PLN Indonesia Power 2. Vice President of Energy Transition and Climate Change, PT PLN (Persero)
14.10 – 14.30	Strategi Bisnis dalam Implementasi Penerapan Pajak karbon (a.l potensi proyek retrofit kilang, proyek hulu migas, sertifikat pengurangan emisi GRK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oki Muraza, Ph.D, Senior Vice President, Technology Innovation, Pertamina (Persero) 2. Vice President Pertamina Energy Institute
14.30 – 15.50	Diskusi	Seluruh peserta
15.50 – 16.00	Kesimpulan dan Penutup	Dr. Dina Nurul Fitria, S.E., M.T., CSCA., CRP (Fasilitator)

Lampiran III

Nomor : 255.Und/EK.03/SJD/2024

Tanggal : 7 Mei 2024

(KOP INSTANSI)

SURAT TUGAS MENJADI NARASUMBER (ASN. AKADEMISI)

No:

Menindaklanjuti Surat Undangan Nomor: tanggal 2024, dengan ini kami menugaskan kepada:

No	Nama	NIP/NIK	Jabatan
1			
2			

untuk menjadi narasumber pada rapat yang diselenggarakan pada

Tempat Pelaksanaan :

Waktu Pelaksanaan :

Uraian Tugas :

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2024

(Jabatan Pimpinan Instansi)

Ttd.

(Nama Lengkap)

Lampiran IV

Nomor : 255.Und/EK.03/SJD/2024

Tanggal : 7 Mei 2024

FORM DATA NARASUMBER

Nama	
No. Telepon/Handphone	
NIP/NIK*	
Jabatan	
Status Kepegawaian	(ASN/Non ASN)
Email	
Nama Bank	
Nama di Rekening	
Nomor Rekening	
Nomor NPWP*	
Pangkat / Golongan	
Nama Unit Kerja	
Alamat Unit Kerja	

*foto KTP, foto NPWP dan bahan presentasi narasumber harap disampaikan melalui email ke bagian.kebijakanenergi@gmail.com atau melalui No WhatsAp: +6285716617407 (Siti Mutimah).

LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nama dan NIK : Ir. Yodfiatfinda PhD
Jabatan dan Unit Kerja : Dosen Prodi Agribisnis

Melaporkan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat sebagai berikut:

1. Nama Kegiatan : Focus Group Discussion
Bentuk partisipasi : Narasumber tema "Kebijakan Dekarbonisasi di Sektor Agro Bisnis
2. Penyelenggara : Dewan Energi Nasional
3. Tempat Pelaksanaan : IPB International Convention Center – Kota Bogor
4. Waktu Pelaksanaan : 08 Mei 2024

5. Uraian singkat mengenai pendidikan/pelatihan :

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan atas Undangan yang diberikan oleh pihak penyelenggara yaitu Dewan Energi Nasional, surat undangan nomor 255.Und/EK.03/SJD/2024 (terlampir).

Acara ini dilaksanakan pada hari Rabu, 08 Mei 2024, diikuti oleh Kementerian/Lembaga, BRIN, BUMN, Pelaku Usaha, LSM dan Perguruan Tinggi yang terkait Kebijakan Energi dan Dekarbonisasi dengan total peserta sekitar 30 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada Pemerintah melalui Dewan Energi Nasional untuk memperbaiki peraturan dan perundangan terkait pajak karbon.

Seperti diketahui, perubahan iklim global telah menjadi perhatian di seluruh dunia karena membawa dampak yang sangat besar terhadap kehidupan manusia di planet ini. Kenaikan suhu bumi yang ditarget tidak lebih dari 2 derajat Celsius menjadi concern yang harus dicapai dengan maksimal. Oleh karena itu semua Negara yang telah meratifikasi Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim (termasuk Indonesia) harus menunjukkan komitemennya untuk menekan emisi karbon di negara masing-masing.

Pembicara memberikan materi tentang metode perhitungan, dampak terhadap perekonomian, serta komitmen Indonesia tentang upaya mencapai zero carbon emission tahun 2050. Sektor-sektor perekonomian yang terkait dengan emisi karbon dalam operasional usahanya perlu diberikan pemahaman bahwa pajak karbon sebenarnya adalah untuk menggiring pelaku usaha kearah pengurangan emisi karbon.

Dosen Pelaksana,

Ir. Yodfiatfinda, MM., Ph.D
NIDN: 0406096701

Jakarta, 08 Mei 2024
Mengetahui
Kepala LPPM

Dr. Ahmad Rifky Fauzi

DOKUMENTASI KEGIATAN



Kebijakan Dekarbonisasi di Sektor Agro Bisnis

Ir. Yodfiatfinda, Ph.D

Dosen Universitas Trilogi-Jakarta

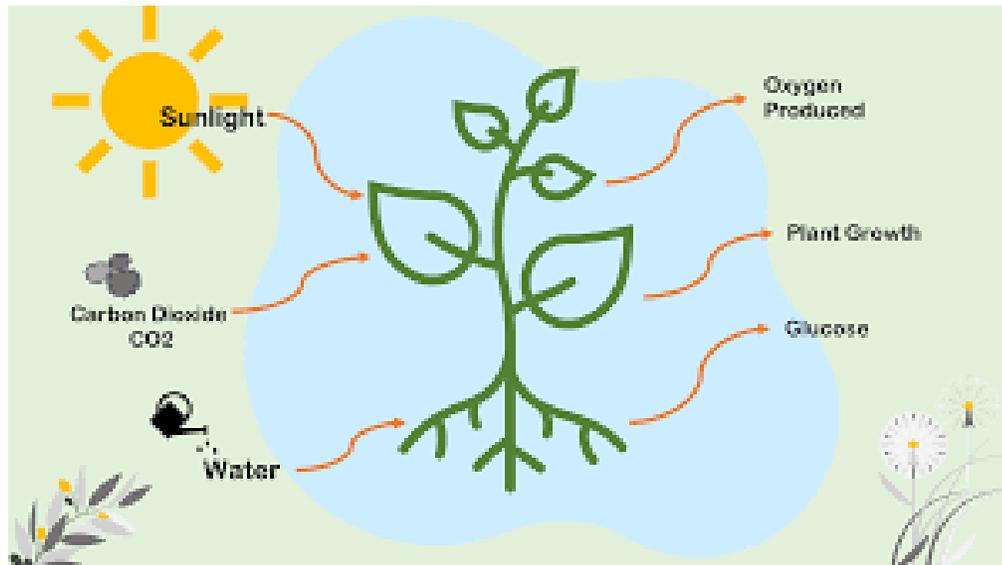
PENDAHULUAN

Peranan Agribisnis dalam Perekonomian

- ❖ Lapangan Pekerjaan (28,56%) terbesar dibandingkan sector lain
- ❖ Sumber pangan, serat dan farmasi
- ❖ Penggerak sektor Industri/trickle down effect
- ❖ Keseimbangan lingkungan

Pertanian dalam Arti Luas

- ▶ Memanen energy surya langsung atau tidak langsung melalui proses foto sintesis untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia



Emisi Karbon Pada Kegiatan Pertanian

- ❑ Pembukaan lahan
- ❑ Kebakaran hutan dan lahan gambut
- ❑ Penggunaan energy fosil dalam mekanisasi dan industry pengolahan makanan
- ❑ Food lost

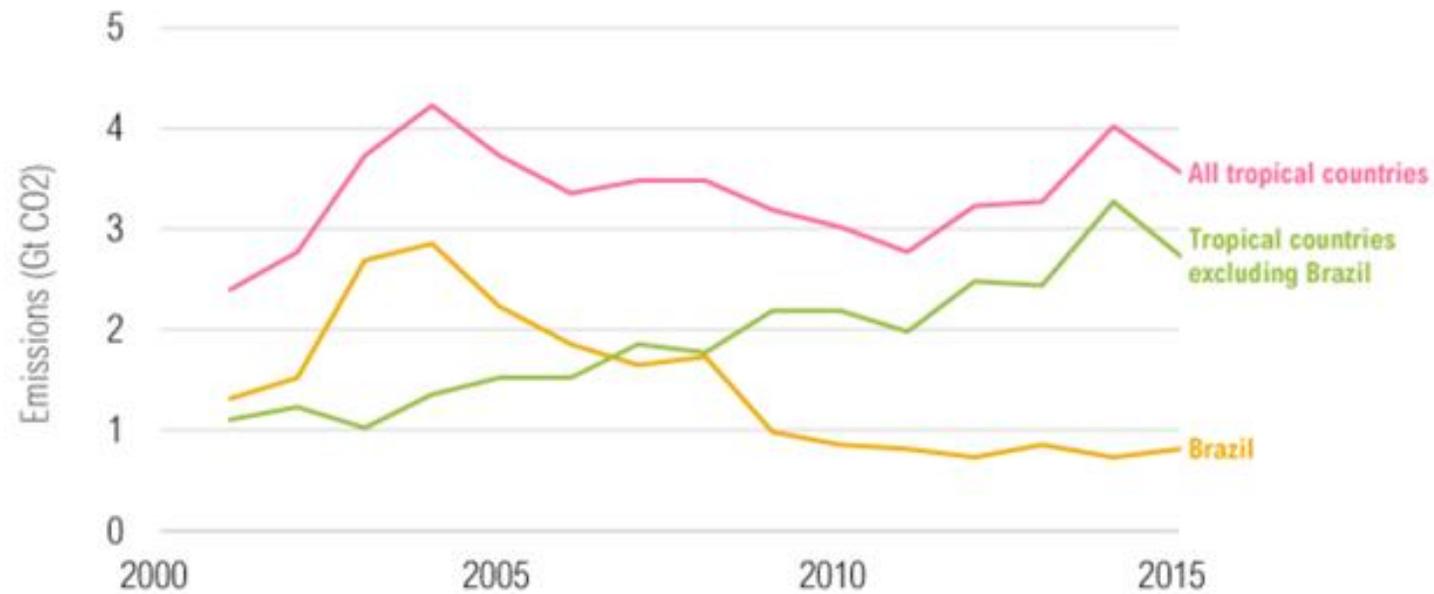
25% total emisi karbon dunia berasal dari kegiatan pertanian

Di Indonesia: limbah cair pabrik kelapa sawit menyumbang

1.824 kt emisi karbon

Pertanian tradisional dahulu menggunakan tenaga hewan kuda, kerbau, sapi. Sekarang menggunakan mesin berbahan bakar fosil

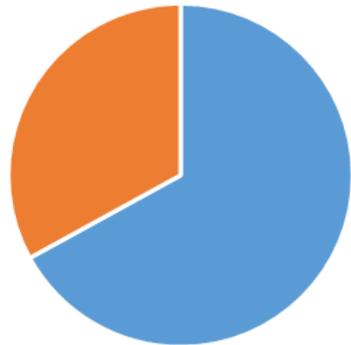
Emisi Karbon di negara tropis



bit.ly/RecarbonizeLand

Forest Carbon Lyfe Cycle

Serapan Karbon oleh hutan



■ terbuang ke atmosfer ■ Hutan



Upaya Dekarbonisasi dalam Agribisnis

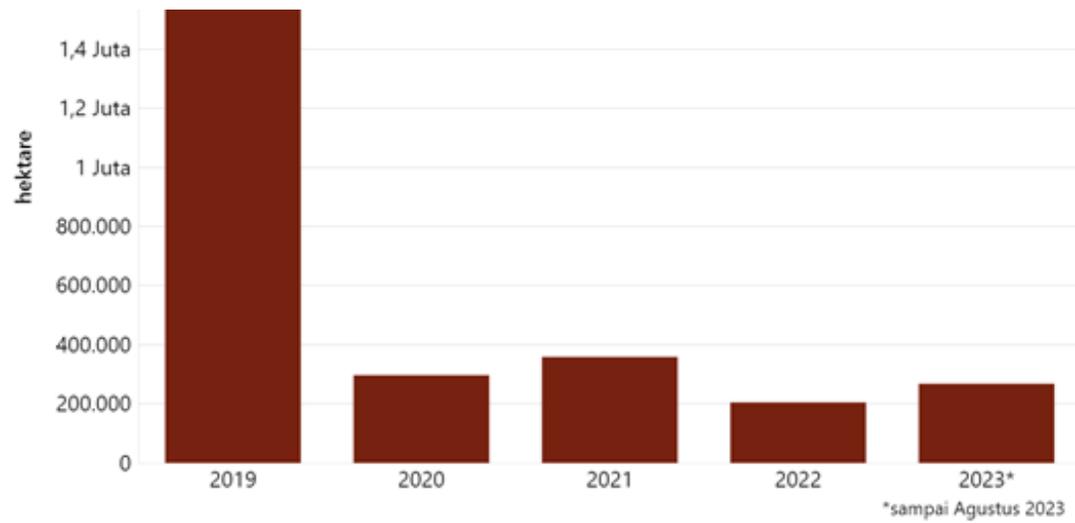
Perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca (GRK) menjadi isu global yang kian mendesak

- ▶ *Menghentikan deforestasi dan menggalakan reboisasi*
- ▶ Menjaga kesuburan tanah secara alami (rotasi tanaman, efisiensi pengairan, menjaga keseimbangan ekosistem), Mengurangi penggunaan pupuk kimia
- ▶ Integrated farming
- ▶ *Restorasi lahan gambut*
- ▶ *Restorasi hutan bakau*
- ▶ Pemanfaatan gas buang limbah pertanian (metana)
- ▶ Substitusi energy biomasa dengan energy biru seperti pembangkit mikrohidro di kawasan perdesaan.
- ▶ Penghutankan kembali lahan bekas pertambangan

Deforestasi dan Reboisasi

- ▶ Tahun 2022: luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 96 juta ha atau 51,2 % dari total daratan (Kemen KLH)
- ▶ 88,3 juta ha (92,0 % dari total luas berhutan) berada di dalam kawasan hutan.
- ▶ Hutan menghadapi dilemma: laju deforestasi bruto sebesar 119,4 ribu ha (2021-2022)
- ▶ Laju reboisasi 15,4 ribu ha, sehingga terjadi netto deforestasi seluas 104 ribu ha

Sumber: <http://sigap.menlhk.go.id>



Sumber: Kemen KLH

Restorasi lahan gambut



Lahan gambut di Indonesia menyimpan sekitar 57 gigaton karbon atau 20 kali lipat karbon tanah mineral biasa.

Gangguan terhadap ecosystem gambut: kebakaran lahan, pembangunan peruntukan tujuan pertanian, pemukiman, kawasan transmigrasi, tujuan wisata, jalan, drainase dan sebagainya

Mangrove Ecosystem

- Hutan mangrove menyerap 110 kilogram karbon/ha, sepertiganya dilepaskan berupa endapan organik di lumpur.
- hutan mangrove menyimpan 800-1.200 ton karbon per hektar.
- Ecology pressure terhadap hutan mangrove diantaranya ialah: penebangan untuk kayu bakar/arang, pencemaran lingkungan, pembangunan kawasan wisata bahari, pelabuhan, pemukiman dan tambak udang/bandeng





Kerjasama Pemangku Kepentingan

- K/L: Kementerian ESDM, Kemen LH, KKP, Kementan, KemenDes-PDT, DLL.
- BUMN (PLN, PERTAMINA, PTPN, PERHUTANI, INHUTANI DLL)
- PERGURUAN TINGGI
- LSM dan Tokoh Masyarakat
- PEMERINTAH DAERAH

Regulasi yang Sudah diKeluarkan

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon

Thank You

